



Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM

MIMBAR HUKUM

Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

ISSN 0852-100X

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Irna Nurhayati

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ELECTORAL QUOTA* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2004-2009

Andy Omara

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI TELAGA OMANG DAN NGLORO KECAMATAN SAPTOSARI, GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Sulastriyono

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Mailinda Eka Yuniza

SUNSET POLICY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dahlia Hasan

IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI KOTA GORONTALO

Weny Almoravid Dunga

HAK ULAYAT LAUT DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KEPULAUAN KEI DAN PAPUA

Roberth Kurniawan Ruslak Hammar

STATUS HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Wisnu Aryo Dewanto

FENOMENA MENGABAIKAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Yohanes Suhardin

KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

PENEGAKKAN HUKUM KEHUTANAN DALAM RANGKA ANTISIPASI DAMPAK *CLIMATE CHANGE* DI INDONESIA

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

PENGECUALIAN TERHADAP PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

Hartini

PERAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI ERA GLOBALISASI

A. Reni Widyastuti

Mimbar Hukum	Vol. 21	No. 2	Hlm. 203-408	Yogyakarta Juni 2009	ISSN 0852-100X
-----------------	------------	----------	-----------------	-------------------------	-------------------

MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM

ISSN 0852-100X

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tiga kali setahun
pada bulan Februari, Juni dan Oktober.
Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

Ketua Penyunting

Andy Omara, S.H., M.Pub & Int. Law

Wakil Ketua Penyunting

Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.

Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.

Prof. Dr. Muchsan, S.H.

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., MH.

Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL, MPA.

Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H., MS.

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Siti Ismijatie Jenie, S.H., C.N.

Prof. Dr. Soemaryo Soeryokusumo, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Mohd. Burhan Tsani, S.H., MH.

Penyunting Pelaksana

Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Herliana, S.H., M. Comm. Law.

Sulastriyono, S.H., M.Si.

Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

Dina Widyaputri K., S.H., LL.M.

Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

Staf Administrasi

Aruani Dwi Astuti, A.Md.

Fallia Maunentia

Dian Agung Wicaksono

Alamat Sekretariat Mimbar Hukum : Gedung II Lantai I Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia, No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telepon/Fax. (0274) 512781, e-mail: hk-mimbar@ugm.ac.id.

Penyunting menerima sumbangan tulisan berupa artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ketentuan penulisan artikel dapat dilihat di halaman kulit dalam-belakang tentang "Persyaratan dan Petunjuk Penulisan Artikel".

MIMBAR HUKUM

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ISSN 0852-100X

Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

Halaman 203 - 408

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN <i>Irna Nurhayati</i>	203 - 222
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN <i>ELECTORAL QUOTA</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2004-2009 <i>Andy Omara</i>	223 - 242
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI TELAGA OMANG DAN NGLORO KECAMATAN SAPTOSARI, GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA <i>Sulastriyono</i>	243 - 256
PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN <i>Mailinda Eka Yuniza</i>	257 - 278
<i>SUNSET POLICY</i> DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Dahlia Hasan</i>	279 - 296
IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI KOTA GORONTALO <i>Weny Almoravid Dunga</i>	297 - 310
HAK ULAYAT LAUT DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KEPULAUAN KEI DAN PAPUA <i>Roberth Kurniawan Ruslak Hammar</i>	311 - 324
STATUS HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA <i>Wisnu Aryo Dewanto</i>	325 - 340
FENOMENA MENGABAIKAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM <i>Yohanes Suhardin</i>	341 - 354
KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA <i>Elisabeth Nurhaini Butarbutar</i>	355 - 370
PENEGAKKAN HUKUM KEHUTANAN DALAM RANGKA ANTISIPASI DAMPAK <i>CLIMATE CHANGE</i> DI INDONESIA <i>I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani</i>	371 - 380
PENGECUALIAN TERHADAP PENERAPAN ASAS <i>ULTRA PETITUM PARTIUM</i> DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA <i>Hartini</i>	381 - 394
PERAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI ERA GLOBALISASI <i>A. Reni Widyastuti</i>	395 - 408

STATUS HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Wisnu Aryo Dewanto¹

Abstract

A rule of international law is regarded as non-self-executing in the Indonesian legal system. It means the international legal norm does not have legal binding force in the domestic courts of Indonesia without an implementing legislation. Indonesia is a dualist country vis-à-vis the relation of international law and national law. In regard with the implementation of rules of international law into the Indonesian courts, Indonesia follows the transformation theory where the rules of international law must be transposed into national laws to have them enforced. Therefore, it is the supremacy of national law over international law before the domestic courts.

Kata Kunci: *non-self-executing treaties, sistem hukum Indonesia, dualisme, teori transformasi, implementing legislation.*

A. Pendahuluan

Indonesia banyak mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan nasional sejak jatuhnya rezim Soeharto. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang selama ini dianggap sebagai Konstitusi yang “*sacred*”¹ telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada bulan Oktober 1999, kedua di bulan Agustus 2000, dilanjutkan dengan perubahan ketiga pada bulan November 2001 dan kemudian perubahan keempat pada bulan Agustus 2002.²

Pada era Soeharto, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar karena presiden pada saat itu juga dianggap sebagai “*the Chief Executive of State*”, dimana segala urusan administratif, kekuasaan dan tanggungjawab berada di pundak seorang presiden.³ Sebelum ada perubahan UUD 1945, presiden Indonesia merupakan panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.⁴ Selain itu, presiden juga dapat membuat pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,⁵ dan menyatakan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. (email: wisnu@ubaya.ac.id)

² Lindsey, Tim. “Indonesian Constitutional Reform: Muddling Toward Democracy”. *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 6 Sing. J. Int’l & Comp. L., 2002, hlm. 244.

³ Tabalujan, Benny S., “The Indonesian Legal System: An Overview”, <http://www.llrx.com/features/indonesia.htm/introduction>, diakses pada 19 April 2009.

⁴ Ellis, Andrew. “The Indonesian Constitutional Transition: Conservatism or Fundamental Change?”. *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 6 Sing. J. Int’l & Comp. L. 116, 2002, hlm. 119.

⁵ Lihat Pasal 10 UUD 1945.

⁶ Lihat Pasal 11 UUD 1945.